

STRATEGI PEMERINTAH KOTA BEKASI DALAM MENINGKATKAN LITERASI DIGITAL MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA Mendukung PENGEMBANGAN *SMART CITY*

Novie Panda Citra

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Info Artikel

Received
9 Mei 2025
Accepted
24 Juni 2025
Published
10 Juli 2025

Kata Kunci:
Literasi Digital;
Smart City;
Pemerintah Kota
Bekasi

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis strategi pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat serta mengevaluasi kontribusinya terhadap keberhasilan pengembangan *Smart City* di Kota Bekasi. Studi kasus ini menggambarkan berbagai strategi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah yaitu Pemkot Bekasi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan literasi digital masyarakat. Metode kualitatif dipergunakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun metode deskriptif kualitatif dipergunakan untuk bisa menjelaskan kejadian dan masalah di lapangan melalui berbagai kegiatan pengumpulan data pustaka ataupun literatur, mencatat, membaca serta mengolah bahan kajian dari bermacam literatur. Sumber data di dapatkan dari artikel ataupun tulisan lain yang mengkaji mengenai literasi digital, *Smart City* dan strategi literasi digital dalam mengembangkan *Smart City* Kota Bekasi, baik berupa bahan laporan maupun kebijakan mengenai literasi digital serta berita dari media terkait dengan literasi digital dan *Smart City*. Hasil penelitian ini menjelaskan gambaran mengenai apa saja upaya dan strategi dalam membangun masyarakat Kota Bekasi dalam literasi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) sebagai bagian dalam membangun *Smart City* atau Kota Pintar. Dalam penelitian ini berkesimpulan bahwa berbagai strategi berupa pelatihan dalam penggunaan teknologi digital, peningkatan jumlah serta ragam pembelajaran melalui penyediaan teknologi informasi komunikasi diruang publik dan penyebaran informasi melalui media sosial, pengoptimalan akses internet dan penyediaan media digital di ruang publik; peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan; penguatan tata kelola melalui penyediaan aturan dan anggaran merupakan strategi yang variatif. Selain itu, temuan penelitian menyoroti berbagai strategi yang diimplementasikan, berjalan sesuai dengan kondisi dan karakter masyarakat Kota Bekasi yang beraneka ragam dan diperlukan kolaborasi untuk keberlanjutan program dan kegiatan di masa mendatang.

Abstract

The purpose of this study is to identify the Bekasi City Government's strategy in improving the digital literacy of the community as an effort to support the development of Bekasi City's *Smart City*. This case study describes various strategies that have been carried out by the Regional Government, namely the Bekasi City Government, to improve the digital literacy skills and abilities of the community. Qualitative methods are used with a qualitative descriptive approach. The qualitative descriptive method is used to be able to explain events and problems in the field through various library or literature data collection activities, recording, reading and processing study materials from various literatures. Data sources are obtained from articles or other writings that examine digital literacy, *Smart City* and digital literacy strategies in developing Bekasi City's *Smart City*, both in the form of report materials and policies regarding digital literacy and news from the media related to digital literacy and *Smart City*. The results of this study explain the description of what efforts and strategies are in building the Bekasi City community in ICT (Information and Communication Technology) literacy as part of building a *Smart City*. This study concludes that various strategies in the form of training in the use of digital technology, increasing the number and variety of learning through the provision of information and communication technology in public spaces and the dissemination of information through social media, optimizing internet access and providing digital media in public spaces; increasing stakeholder engagement; strengthening governance through the provision of rules and budgets are varied strategies. In addition, research findings highlight the various strategies implemented, running in accordance with the conditions and characters of the diverse Bekasi City community and collaboration is needed for the sustainability of programs and activities in the future.

PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi bukan saja dapat menciptakan masyarakat secara global di seluruh dunia tetapi juga dapat mengembangkan ruang mobilitas di dunia yang kian modern untuk manusia dan masyarakat, tidak kita sadari saat ini suatu komunitas masyarakat yang hidup dalam dunia nyata dan dunia maya (Marrie et al., 2019). Saat ini TIK berkembang dengan sangat pesat, *internet of things* telah merajai ruang mobilitas kehidupan masyarakat. Karakteristiknya yang interaktif sudah pasti memiliki dampak pada aktivitas komunikasi yang sudah tidak memiliki batas jarak, ruang dan waktu. Jaringan yang penuh dengan aliran informasi ini tidak hanya berhubungan dengan bagaimana masyarakat berkomunikasi dengan satu sama lain, tetapi juga berkaitan dengan keseluruhan perangkat yang di gunakan dan kehadiran Kota Pintar atau *Smart City* membuat seluruh alat-alat yang digunakan masyarakat sehari-hari terhubung dengan jaringan analisa data yang membuat hidup menjadi semakin *super connected* (Chayko, 2018).

Informasi yang bergerak sangat cepat dalam masyarakat di era digital membuat kecepatan menjadi sebuah faktor penting yang membentuk ‘sosok’ individu secara kognitif, sehingga masyarakat dianggap memiliki pengetahuan tidak hanya berdasarkan kemampuannya dalam membaca fakta dan membuat konsep, tetapi juga diharapkan memiliki kemampuan spesifik yang dibutuhkan untuk mengekspresikan dirinya (Rivoltella, 2008). Suatu negara dapat dianggap maju ataupun tidak, bisa dilihat dari aktivitas kebiasaan literasinya. Menurut Suherdi et al., (2021) bangsa yang besar yaitu bangsa yang identik dengan masyarakat yang literat dan mempunyai peradaban yang tinggi. Bangsa dengan literasi yang tinggi mampu memiliki pola pikir kritis, kreatif, komunikatif untuk menjalani era global dalam kancangnya arus digital. Perubahan informasi dan teknologi yang terjadi dalam waktu sangat singkat, membuat masyarakat memerlukan sebuah kemampuan khusus sebagai bentuk pengembangan diri dan pengetahuan yang dimiliki. Kemampuan inilah yang disebut dengan literasi digital, menjadikan kemampuan paling penting yang wajib dipunyai oleh masyarakat di era digital untuk dapat mengimbangi kebutuhan teknologi saat ini.

Konsep literasi digital merupakan konsep yang muncul bersamaan, seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin dipengaruhi perkembangan teknologi informasi komunikasi (TIK). Literasi yang secara harfiah dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk membaca, menulis, dan mendapatkan perluasan arti ketika kata ‘digital’ dilekatkan di belakangnya. Kompleksitas penggunaan media dan perangkat TIK di era digital membuat dua hal tersebut tidak hanya mempengaruhi bagaimana masyarakat melakukan sesuatu, tetapi juga berpengaruh terhadap hubungan dengan orang lain, berhubungan juga dengan identitas yang dibangun di hadapan orang lain, bahkan berhubungan dengan cara masyarakat berpikir dan memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Oleh sebab itu, masyarakat membutuhkan kemampuan yang tidak hanya

berhubungan dengan menggunakan media dan perangkat TIK, tetapi juga kemampuan memahami segala sesuatu yang ada di dalam dunia digital baik secara sosial, teknis maupun kontekstual.

Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate ketika melakukan live report di *channel* Youtube resmi milik Kemenkominfo pada Jumat (12/6/2020) menyatakan bahwa Pemerintah mengutarakan komitmen untuk menjaga produktivitas masyarakat dengan segala macam program peningkatan literasi digital. Apabila merujuk survey yang dilakukan Hootsuite & WeAreSocial (2021) terhadap kebiasaan dan tren penggunaan internet, terdapat kecenderungan peningkatan total pengguna internet dari 88,1 juta di tahun 2016 menjadi 202,6 juta di tahun 2021 (terdapat kenaikan 129,97%). Jumlah proporsi pengguna internet tersebut pada tahun 2021 berdasarkan usia lebih dari 18 tahun adalah sebanyak 190,1 juta atau 69,1% dari total penduduk Indonesia. Fenomena meningkatnya penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia, serta pemanfaatan penggunaan layanan digital yang ada, tidak menjamin kedewasaan masyarakat dalam penggunaan internet maka pemahaman akan literasi digital memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.



Gambar 1. Jumlah pengguna internet Indonesia Tahun 2016-2021

Sumber : (Hootsuite & WeAreSocial, 2016 s.d 2021)

Hal inilah yang mendorong Kemenkominfo berupaya membuat kebijakan dalam menggalakkan peningkatan literasi digital masyarakat, yaitu dengan mengeluarkan empat pilar literasi digital dengan tujuan untuk memperkenalkan serta memberikan pengetahuan tentang perangkat TIK diantaranya *digital skill*, kemampuan masyarakat untuk mengerti dalam menggunakan *hardware and software* didalam aktivitas keseharian; *digital ethics*, kemampuan secara sadar, mempertimbangan, mengembangkan serta mengelola etika digital dalam keseharian; *digital safety*. kemampuan masyarakat dalam mengenali, menerapkan dan meningkatkan kesadaran dalam melindungi data pribadi dan keamanan digital; serta *digital culture*, suatu aktivitas masyarakat diruang digital dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan memiliki wawasan kebangsaan. Dengan empat pilar tersebut diharapkan mampu membangun masyarakat Indonesia yang melek digital serta memiliki daya saing tinggi melalui teknologi digital.

Survei yang dilakukan Ditjen Aptika Kemkominfo bersama Katadata pada tahun 2021, dalam menyelenggarakan survei Literasi Digital Nasional yang merujuk kepada UNESCO. Bahwa dari hasil survei menunjukkan indeks literasi digital masyarakat Indonesia pada posisi di angka 3,49 dari skala 1-5. Dari survei ini di dapatkan bahwa *digital culture* memperoleh nilai tertinggi 3,90; *digital etics* 3,53; *digital skill* 3,44 dan *digital safety* mendapat nilai terendah 3,10. Kondisi ini memperlihatkan indeks literasi digital Indonesia memiliki skor sedikit di atas tingkatan sedang dan belum memperlihatkan kondisi baik. Pengukuran indeks literasi digital ini adalah untuk mengidentifikasi status literasi digital masyarakat Indonesia seberapa jauh serta memastikan upaya peningkatan literasi digital masyarakat dapat tepat dan sesuai sasaran.

Upaya meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia, tidak hanya dilakukan oleh Kemenkominfo saja. Pemda dalam hal ini Pemerintah Kota Bekasi sebagai leading sektornya dan Diskominfo Kota Bekasi sebagai penanggung jawab turut ikut serta melaksanakan upaya dalam meningkatkan literasi digital masyarakat sebagai bentuk dukungan pengembangan *Smart City*. Menurut Ghaffarianhoseini et al., (2018) *Smart City* muncul karena adanya penggunaan TIK secara cerdas seperti dalam bidang kesehatan, mobilitas, lingkungan, ekonomi, pendidikan dan sebagainya, maka dengan teknologi yang cerdas tersebut, harus diimbangi dengan kemampuan cakap akan literasi digital.

Deakin (2014) mendefinisikan *Smart City* yaitu bagaimana pemanfaatan ICT dalam mencukupi keinginan masyarakat, bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses ini memerlukan wadah yaitu Kota Pintar, sehingga *Smart City* akan menjadi kota yang tidak saja mempunyai teknologi ICT, namun juga mengaplikasikan teknologi dengan aktivitas yang tepat, yang memiliki dampak kepada masyarakat. Kehadiran *Smart City* ini sebagai cara menyelesaikan bermacam persoalan kota, dengan memanfaatkan TIK untuk mendorong pemerintah dalam menciptakan layanan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Upaya pemerintah Kota Bekasi dalam mengembangkan *Smart City* diakui oleh Kemenkominfo, ini dibuktikan dengan penghargaan yang didapat oleh Kota Bekasi atas implementasinya pada program *Smart City* kategori *Smart Governance* tahun 2021. Sehingga ini semakin memacu Kota Bekasi untuk menghadirkan berbagai program dan kebijakan yang berkualitas bagi masyarakat salah satunya melalui peningkatan literasi digital masyarakat. Literasi digital merupakan gerakan bersama yang tidak bisa dikerjakan sendiri, namun diperlukan keterlibatan dari seluruh *stakeholder*. Hal ini pun selaras dengan Perwal Bekasi No 110 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Kota Cerdas Bekasi, yang mana dalam upaya mempercepat pembangunan Kota Cerdas Bekasi dibutuhkan tata kelola (*Good Governance*) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Kota Bekasi.

Hadirnya *Bekasi Smart City* di Kota Bekasi diharapkan dapat mewujudkan kualitas manusia yang memahami budaya digital dan melek digital, sehingga implementasi dari Kota Pintar yang digaungkan oleh

Pemerintah dapat terealisasi dengan baik. Dimana tujuan dari keberadaan *Bekasi Smart City* adalah menyelesaikan persoalan dan permasalahan di perkotaan serta membuat hidup masyarakat lebih baik lagi, salah satunya adalah pemahaman akan literasi digital di era kemajuan TIK yang berkembang dengan sangat cepat.

Namun pada kenyataannya, masih terdapat berbagai program *Bekasi Smart City* yang belum diketahui dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat serta sosialisasi dan publikasi yang masih minim. Menurut Diskominfo Kota Bekasi, masih ditemukan kesenjangan teknologi terkait *mindset* masyarakat dalam memanfaatkan TIK serta masih menghadapi sejumlah tantangan dalam aspek pemahaman dan pemanfaatan teknologi secara kritis dan aman. Berdasarkan data Diskominfo Kota Bekasi (2022), sekitar 72% warga telah memiliki akses internet melalui perangkat pribadi, tetapi hanya 45% yang memahami pentingnya perlindungan data pribadi saat online dan hanya 38% yang pernah mengikuti pelatihan literasi digital. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara akses teknologi dan kemampuan penggunaannya secara bijak.

Selain itu, dibidang pendidikan, program *Bekasi Smart School* yang diluncurkan sejak tahun 2021 telah mendorong digitalisasi pembelajaran disekolah. Namun tantang muncul dalam pemerataan kemampuan guru dan siswa dalam memanfaatkan platform digital secara optimal. Laporan Dina Pendidikan Kota Bekasi (2023) menyebutkan hanya sekitar 53% guru SD dan SMP yang menyatakan percaya diri menggunakan *Learning Management System* (LMS) secara mandiri.

Hal ini mengindikasikan bahwa akses belum sepenuhnya diiringi oleh kompetensi yang memadai dalam menggunakan teknologi secara produktif, aman, dan bertanggung jawab. Pada dasarnya upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat Kota Bekasi guna mewujudkan *Smart City* yang berkelanjutan, sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Induk *Smart City* Nasional dan Literasi Digital Nasional dari Kemenkominfo. Namun, kondisi seperti kesenjangan akses, rendahnya keterampilan digital dan resistensi terhadap perubahan budaya digital masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditangani secara kolaboratif dan berkelanjutan. Melihat kompleksitas tantangan dan pentingnya penguatan literasi digital dalam mendukung pengembangan *Bekasi Smart City*, maka kajian ini menjadi penting untuk memahami lebih dalam mengenai strategi Pemerintah Kota Bekasi dan implikasinya terhadap pengembangan masyarakat digital.

Adapun kajian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis strategi pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat serta mengevaluasi kontribusinya terhadap keberhasilan pengembangan *Smart City* di Bekasi. Sehingga memunculkan sebuah pertanyaan besar, bagaimana strategi pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat sebagai upaya mendukung pengembangan *Bekasi Smart City* yang berkelanjutan.

METODE

Metode kualitatif dipergunakan dalam kajian ini dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun penggunaan deskriptif kualitatif ini sebagai metode yang ditujukan untuk memberikan gambaran yang terperinci dan komprehensif mengenai suatu fenomena atau kejadian. Fokus dari pendekatan ini adalah pada pemahaman yang dalam dan interpretatif terhadap konteks tertentu, tanpa melakukan pengukuran kuantitatif terhadap fenomena (Sugiyono, 2019). Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran tentang fenomena dan masalah di lapangan dengan data dari studi literatur. Studi literatur terdiri dari pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah informasi dari berbagai sumber literatur (Zed, 2008). Data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari artikel dan jurnal yang membahas tentang literasi digital dan perkembangan *Smart City* di masyarakat, juga data publikasi dari Pemerintah Kota Bekasi seperti bahan paparan dan kebijakan terkait literasi digital dan *Smart City*, serta berita dari media tentang perkembangan literasi digital dan *Smart City* di Kota Bekasi. Dokumen-dokumen tersebut akan dipelajari untuk memahami lebih lanjut strategi Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat demi menciptakan *Smart City* yang lebih baik. Laporan penelitian disajikan dengan penuh cerita, membahas temuan penting, dan menjelaskan dampaknya bagi strategi Pemerintah Kota Bekasi untuk mewujudkan *Smart City*.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Pratama (2021) menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan *Smart City*, dengan menekankan bahwa kesuksesan transformasi digital tidak bisa dilepaskan dari kesiapan literasi masyarakat. Dalam studi kasus kota Bandung, menemukan bahwa kurangnya literasi digital masyarakat menjadi hambatan utama dalam implementasi sistem layanan digital publik.

Sementara itu, penelitian oleh Mahmudah dan Hasanah (2022) di Kota Surabaya menunjukkan bahwa meskipun kota tersebut sudah memiliki infrastruktur digital yang baik, partisipasi Masyarakat dalam memanfaatkan aplikasi layanan public masih rendah karena minimnya pelatihan literasi digital. Hal ini menunjukkan pentingnya strategi khusus yang menjangkau masyarakat secara inklusif untuk meningkatkan keterampilan digital dasar dan esadaran terhadap manfaat layanan digital.

Di sisi lain, Kurniawati (2020) di Kota Yogyakarta mengkaji strategi pemerintah daerah dalam membangun *Smart City* berbasis komunitas. Penelitian ini menyoroti pentingnya edukasi digital yang berkelanjutan serta penguatan peran komunitas lokal sebagai agen perubahan literasi digital di masyarakat. Namun, studi ini tidak secara eksplisit membahas hubungan strategis antara peningkatan literasi digital dan keberhasilan implementasi *Smart City*.

Penelitian oleh Siregar dan Puspitasari (2022) yang meneliti indeks literasi digital di Kota Bekasi mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki tingkat literasi digital yang sedang, dengan kelemahan paling besar pada aspek digital safety.

Meskipun data ini penting, penelitian tersebut belum secara komprehensif membahas strategi Pemkot Bekasi dalam mengatasi kesenjangan literasi digital, maupun bagaimana strategi tersebut dikaitkan dengan pengembangan *Smart City*.

Dari berbagai studi yang telah dilakukan, terlihat bahwa masih sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji strategi Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat secara kontekstual dan sistematis sebagai bagian dari kebijakan dan program pengembangan *Smart City*. Studi-studi terdahulu cenderung bersifat umum, memusatkan perhatian pada literasi digital atau *Smart City* sebagai isu yang terpisah. Kebaruan dari tulisan ini terletak pada upaya mengintegrasikan dua dimensi tersebut secara utuh, dengan menyoroti peran Pemerintah Kota Bekasi sebagai aktor strategis, serta mengelaborasi pendekatan-pendekatan yang digunakan secara praktis dan kolaboratif, baik melalui regulasi, program pelatihan, maupun kerja sama dengan komunitas digital lokal.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kekosongan literatur terkait praktik lokal pemerintah kota dalam mengembangkan masyarakat digital di era *Smart City* secara lebih terfokus dan aplikatif, terutama dalam konteks Kota Bekasi sebagai kota berkembang yang memiliki kompleksitas demografis dan digital yang khas.

Literasi Digital

Menurut penelitian Nasrullah et al., (2017), UNESCO menyatakan bahwa literasi digital adalah konsep yang sangat penting untuk memahami dan menggunakan perangkat TIK, seperti Literasi TIK yang melibatkan kemampuan teknis untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas digital. Literasi TIK dapat dijelaskan dari dua perspektif yang berbeda. Awalnya, kecakapan teknologi (*Technological Literacy*) sebelumnya disebut literasi komputer, merujuk terkait memahami teknologi digital mencakup penerima atau pemakai dan keterampilan teknis. Serta keahlian dalam menerima dan mempelajari informasi. Pengetahuan ini difokuskan pada satu bagian, seperti kemampuan untuk menata, mengenali, memproses, dan memanfaatkan informasi digital dengan baik.

Definisi literasi digital, menurut UNESCO sesuai dengan istilah yang diperkenalkan pada tahun 2011, meliputi keterampilan membaca, menulis, dan matematika dalam konteks pendidikan. Maka dari itu, literasi digital mencakup kemampuan mempergunakan teknologi, informasi, dan komunikasi, pembelajaran, serta memiliki pola pikir kritis, kreatif, dan inspiratif sebagai suatu keahlian.

Pada sebuah buku *Digital Literacy* (1997), Paul Gilster (1997) mendefinisikan literasi digital adalah suatu keahlian agar mengerti serta memahami informasi dari bermacam informasi yang luas yang dapat diakses lewat teknologi seperti *smart phone*. Bawden (2001) mengungkapkan, ada konsep literasi digital baru yang berasal dari literasi komputer dan literasi informasi. Peningkatan literasi komputer terjadi selama tahun 1980-an, saat penggunaan komputer mikro makin meluas, baik di dalam bidang usaha dan di masyarakat. Hanya saja, literasi informasi menyebar luas pada tahun 1990-an

ketika informasi menjadi lebih mudah untuk diatur, diakses, dan disebarluaskan melalui jaringan teknologi dan informasi. Berdasarkan pandangan Bawden (2001), literasi digital terutama terhubung dengan kemampuan praktis ketika mengakses, menggabungkan, memahami, dan menyebarkan informasi.

Hagel Deakin University's Graduate Learning Outcome (2015) mengatakan, literasi digital adalah menggunakan teknologi untuk mencari, memanfaatkan, serta menyebarkan informasi di era digital. Kemampuan literasi digital meliputi pemahaman, analisis, penilaian, pengaturan, dan evaluasi informasi menggunakan teknologi digital. Maknanya adalah pemahaman mengenai teknologi, variasi dan penerapannya, dengan kesadaran terhadap implikasinya pada individu dan masyarakat.

Literasi digital memberikan kekuatan kepada seseorang untuk berinteraksi, bekerja yang lebih efisien, dan meningkatkan produktivitas, terutama dengan individu yang memiliki kemampuan dan tingkat keterampilan yang sejajar (Mohammadyari & Singh, 2015). Selanjutnya Common Sense Media (2009) menyatakan literasi digital melibatkan beberapa keterampilan yaitu menggunakan teknologi dengan baik, memahami konten digital, serta mengevaluasi kredibilitasnya dan menggunakan alat yang sesuai untuk membuat, menyelidiki, dan berkomunikasi.

Peningkatan Literasi Digital

Menurut Nasrullah et al., (2017) terdapat prinsip dasar dalam mengembangkan literasi digital :

1. **Pemahaman**
Literasi digital yaitu mengerti dan memahami dengan mudah dan *simple* diantaranya *skill* untuk mengekstrak ide secara implisit serta eksplicit dari media.
2. **Saling Ketergantungan**
Literasi digital merupakan hubungan timbal balik antara berbagai media dalam berbagai cara: potensial, metaforis, ideal, dan harfiah. Dulu, sedikitnya jumlah media diciptakan dengan niat untuk memisahkan dan membuat proses terbit menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Semakin maraknya media saat ini, diharapkan berbagai jenis media tidak saja beriringan, namun dapat saling sejalan dan melengkapi.
3. **Faktor Sosial**
Sharing bukan hanya berfungsi menampilkan identitas diri atau menyebarkan informasi, tapi bisa menyampaikan pesan sendiri. Identitas pengirim, penerima, dan saluran informasi dapat mempengaruhi kesuksesan media dan membentuk cara orang mencari, berbagi, dan menyimpan informasi serta mempengaruhi evolusi media.
4. **Kurasi**
Mempunyai kemampuan untuk menyimpan konten di media sosial dengan cara *save to read later* sebagai bagian dari literasi informasi yang berfokus pada pemahaman nilai informasi dan kemampuan menyimpannya untuk akses yang lebih mudah dan manfaat dalam waktu yang lama. Kurasi tingkat tinggi harus memiliki sebagai kurasi masyarakat, yaitu bekerja sama untuk menemukan, mengumpulkan, dan mengatur informasi berharga.

Elemen penting literasi digital yaitu terkait kemampuan yang harus dikuasai dalam memanfaatkan TIK. Wheeler (2013) mengidentifikasi ada 9 point penting dalam literasi digital diantaranya :

1. *Social Networking*, adanya situs jejaring sosial merupakan bagian dari *social networking* atau jejaring sosial. Setiap situs jejaring sosial memiliki perbedaan dalam keterampilan memanfaatkan fitur yang disediakan. Pentingnya memanfaatkan situs jejaring sosial juga tidak terabaikan. Keahlian digital memungkinkan untuk menyambung hubungan yang efektif secara online.
2. *Transliteracy*, yaitu keahlian memanfaatkan berbagai platform yang berbeda khususnya dalam menyusun konten, mengumpulkan, membagikan serta mengkomunikasikan melalui media sosial, grup, *smartphone* dan berbagai layanan online yang ada.
3. *Maintaining privacy*, menjaga privasi adalah hal yang penting dalam literasi digital, yang berarti menjaga kerahasiaan saat berada di dunia online. Mengerti berbagai jenis *cybercrime* dan hanya menunjukkan identitas online jika diperlukan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
4. *Managing identity*, berhubungan dengan cara menggunakan identitas dengan baik dan benar diberbagai media sosial dan platform.
5. *Creating content*, membuat konten melibatkan keterampilan di berbagai aplikasi serta platform, juga memanfaatkan beragam platform *e-learning*.
6. *Organising*, mengatur konten agar lebih mudah tersebar.
7. *Sharing content*, berbagi konten informasi supaya lebih mudah tersebar dengan luas, seperti pada pemanfaatan situs *social bookmarking* memudahkan dalam menyebarkan informasi yang dapat diakses masyarakat.
8. *Reusing/repurposing content*, menggunakan kembali konten dapat mengubah bermacam informasi menjadi materi baru yang bisa digunakan kembali untuk berbagai tujuan.
9. *Filtering and selecting content*, cara dalam menemukan, memfilter dan memilih informasi secara baik serta disesuaikan dengan kebutuhan yang diharapkan.
10. *Self broadcasting*, berbagi ide unik atau gagasan serta konten seperti posting di social media ataupun blog pribadi sebagai bentuk *self broadcasting*. Itu merupakan salah satu cara berpartisipasi dalam komunitas digital.

Smart City

Susanto (2019) mengungkapkan, *smart* atau cerdas berarti mampu menyerap, mengolah data dengan tepat dan cepat, sementara *city* adalah tempat masyarakat tinggal dan beraktivitas penduduk yang memiliki batas administrasi yang diatur oleh Undang-Undang, sehingga *Smart City* adalah kota yang proaktif dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan data dari berbagai aspek kota untuk diproses dan direspon dengan cepat dan tepat. Menurut Djunaedi, Marsoyo, et al., (2018), *Smart*

City yaitu kota yang mempunyai kemampuan sistem manajemen perkotaan yang secara otomatis mendeteksi dan menginformasikan tentang masalah yang sedang terjadi, serta memberikan solusi baik secara otomatis maupun manual untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Selanjutnya Yang (2012) menjelaskan bahwa *Smart City* mengacu pada ciri atau tujuan dari *Kota Pintar* tersebut. Yang (2012) menyatakan bahwa *Smart City* adalah kota yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi dan kualitas hidup lebih baik dan berkelanjutan bagi penduduknya dengan penekanan pada peningkatan tata pemerintahan, ekonomi, kualitas hidup, lingkungan, sumber daya manusia, dan transportasi menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Mirip dengan pendapat Yang, Giffinger et al., (2007) menggambarkan *Smart City* sebagai sebuah kota yang memiliki visi masa depan yang baik dengan fokus yang cerdas pada aspek ekonomi, sosial, pemerintahan, transportasi, dan lingkungan.

Berbeda dengan Yang dan Giffinger, definisi *Smart City* selanjutnya dideskripsikan oleh Nurmandi (2014) yang mendefinisikan *Smart City* berdasarkan komponen pendukung *Smart City* yaitu :

- a. Manusia, mengacu kepada manusia yang kreatif, berpendidikan yang saling bersosialisasi dan berkomunikasi untuk mendukung kekayaan sosial, budaya serta ekonomi kota.
- b. Teknologi, mengacu kepada kota yang berbasis TIK yang menunjang berbagai fasilitas pelayanan bagi masyarakat kota.
- c. Kelembagaan, mengacu kepada masyarakat, Pemerintah dan swasta yang paham akan TIK yang mampu menetapkan keputusan berdasarkan TIK.

Definisi *Smart City* bervariasi tergantung pada fokusnya, mulai dari teknologi, layanan, hingga ekonomi dan tingkat kesejahteraan. Meskipun demikian, dapat disimpulkan bahwa *Smart City* merupakan kota yang menggunakan TIK dan berkembang berdasarkan TIK dengan *support* dari institusi dan individu yang inovatif dan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas hidup di dalam kota.

Konsep kota cerdas menunjukkan kecerdasan kota dalam menghadapi kebutuhan seperti industri, pendidikan, demokrasi, logistik, infrastruktur, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan yang harus diprioritaskan. Maka, sebuah kota bisa sukses dalam pengembangan dan pembangunan *Smart City* jika mematuhi enam karakteristik seperti: ekonomi cerdas, masyarakat cerdas, tata pemerintahan cerdas, mobilitas cerdas, lingkungan cerdas, serta gaya hidup cerdas (Djunaedi, Permadi, et al., 2018).

Smart City memiliki definisi yang bervariasi, tergantung orientasi definisi tersebut seperti aspek teknologi, pelayanan, hingga ekonomi dan kualitas hidup. Namun dapat disimpulkan bahwa *Smart City* didefinisikan sebagai kota yang dijalankan dan dikembangkan berdasarkan TIK yang didukung oleh institusi dan manusia yang kreatif dan saling berinteraksi untuk mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik pada kota tersebut.

Karakteristik kota cerdas merupakan ide yang mencerminkan kecerdasan kota dalam merespon kebutuhan kota tersebut, seperti bidang industri, pendidikan, demokrasi, logistik, infrastruktur, keamanan, pembangunan yang berkelanjutan dan efisien yang merupakan visi dan misi perkotaan yang harus disediakan. Oleh karena itu sebuah kota dapat berhasil dalam pengembangan dan pembangunan *Smart City* apabila menerapkan enam karakteristik yaitu : *smart economy, smart people, smart governance, smart mobility, smart environment dan smart living* (Djunaedi, Permadi, et al., 2018) .

Lebih lanjut dalam panduan penyusunan masterplan *Smart City* gerakan menuju 100 *Smart City* Nasional, Kemenkominfo (2017) bahwa gerakan menuju *Smart City* menjelaskan dimensi *Smart City* yaitu :

- a. *Smart governance* memiliki tujuan menciptakan tata Kelola Pemerintahan dan peningkatan kinerja birokrasi dalam teknologi yang terpadu.
- b. *Smart branding* berkaitan dengan inovasi suatu daerah dalam mempromosikan kotanya untuk meningkatkan daya saing.
- c. *Smart economy* berkaitan dengan perwujudan sistem perekonomian yang disruptif dan beradaptasi dengan cepat.
- d. *Smart living* berkaitan dengan jaminan kelayakan taraf hidup masyarakat dengan mewujudkan tempat tinggal yang layak, nyaman dan efisien.
- e. *Smart Society* berkaitan dengan masyarakat sebagai unsur utama sebuah kota dengan mewujudkan ekosistem sosio teknis yang humanis, dinamis dan interaktif yang tinggi dengan *digital literacy*.
- f. *Smart environment* berkaitan dengan mewujudkan tata kelola lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Implementasi Literasi Digital Kota Bekasi Dalam Pengembangan *Smart City Smart City*

Implementasi *Smart City* di Kota Bekasi merupakan bagian dari upaya modernisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sejak bergabung dalam program *Gerakan Menuju 100 Smart City* yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2017, Kota Bekasi telah mengembangkan berbagai inisiatif strategis di enam dimensi utama *Smart City*, yaitu: *Smart Governance, Smart Economy, Smart Living, Smart Environment, Smart Branding, dan Smart Society*. Salah satu pencapaian yang signifikan adalah diraihnya penghargaan pada tahun 2021 dalam kategori *Smart Governance*, yang menunjukkan keberhasilan Kota Bekasi dalam digitalisasi sistem pemerintahan, transparansi layanan publik, serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui aplikasi dan platform digital seperti *LAPOR, Bekasi Single Window (BSW)*, dan *e-Open* (Kemenkominfo, 2021). Digitalisasi tersebut memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan perizinan, pengaduan, hingga informasi kebijakan secara cepat, mudah, dan transparan.

Namun demikian, pelaksanaan *Smart City* di Kota Bekasi masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kesenjangan literasi digital masyarakat, kesiapan sumber daya manusia, serta infrastruktur digital yang belum merata di seluruh wilayah. Berdasarkan laporan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Bekasi, salah satu fokus utama saat ini adalah penguatan ekosistem digital yang inklusif melalui edukasi literasi digital di kalangan pelajar, pelaku UMKM, dan komunitas warga (Diskominfo Kota Bekasi, 2023). Upaya ini juga didukung oleh Peraturan Wali Kota Bekasi No. 110 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kota Cerdas, yang menekankan pentingnya kolaborasi antar-*stakeholder* dalam mempercepat transformasi digital.

Di samping itu, Pemerintah Kota Bekasi juga mendorong pemanfaatan data dalam proses pengambilan keputusan melalui *command center* dan sistem berbasis *big data analytics* untuk memonitor layanan publik secara *real-time*. Dengan demikian, meskipun telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, keberlanjutan dan keberhasilan *Smart City* di Kota Bekasi sangat bergantung pada peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan warga sebagai pelaku utama dalam ekosistem digital kota.

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa faktor yang menjadi dasar Pemerintah Kota Bekasi berupaya meningkatkan literasi digital masyarakatnya yakni Pertama, kehadiran berbagai fasilitas dan pelayanan publik secara online seperti Aplikasi SILAT, Sibrojol E-Open, Sorot, Aplikasi Sikerja, dan sebagainya yang terintegrasi dengan Command Center (Saputra dan Widiyansyah, 2021). Bahwa aplikasi-aplikasi yang sudah ada, nampaknya belum terealisasi dengan baik. Walaupun sebagian besar masyarakat sudah menggunakan aplikasi layanan publik untuk kebutuhan sehari-hari. Namun masih terdapat yang belum digunakan dengan maksimal oleh masyarakat ataupun aplikasi sudah diimplementasikan namun masyarakat masih melakukan cara konvensional (Yud, 2019).

Kedua, fasilitas Mall Pelayanan Publik sebagai implementasi Bekasi *Smart City* yang digaungkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat belum optimal dimanfaatkan, kurangnya pengetahuan tentang fungsi dari Mall Pelayanan Publik dan ketidakpahaman dalam program pelayanan berbasis online, menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mengakses dan memilih untuk datang langsung ke dinas yang dituju, misal mengurus akta langsung ke Disdukcapil padahal sudah ada aplikasi E-Open. Ketiga, salah satu program Bekasi *Smart City* yaitu pembangunan pedestrian di tengah Kota Bekasi yang difungsikan sebagai tempat komunikasi sosial secara *outdoor* pun belum terfungsikan dengan baik atau kurang menjadi pilihan masyarakat, ini dibuktikan dengan sepihnya keberadaan masyarakat di area pedestrian.

Berdasarkan beberapa kondisi tersebut, maka Pemerintah kota Bekasi dalam kurang lebih tiga tahun terakhir menciptakan berbagai strategi yang berfokus pada peningkatan literasi digital masyarakat. Apalagi dengan hasil indeks literasi digital Provinsi Jawa Barat tahun 2020 sebesar 3,41 yang menandakan literasi digital masyarakat

Bekasi sebagai bagian dari wilayah Jawa Barat indeks literasinya nyaris hanya sedikit diatas sedang dan belum dalam kondisi baik.

Berbagai strategi dilakukan dalam meningkatkan literasi digital masyarakat Kota Bekasi. Pada saat itu Plt Walikota Bekasi Tri Ardianto disela menghadiri acara komunitas Masyarakat Peduli Literasi Digital (Malidi) pada Senin (16/07/2019) mengatakan masyarakat harus peduli akan digital dengan seluruh elemen yang terlibat, serta perlu mengedukasi masyarakat, mengkampanyekan literasi digital dan anti hoax. Sehingga ini semakin menguatkan bahwa strategi literasi digital yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bekasi harus dioptimalkan dan didukung oleh seluruh *stakeholder*.

Ada juga program-program pelatihan literasi digital secara daring dan luring, pengembangan infrastruktur teknologi serta optimalisasi platform layanan publik seperti E-open dan Sijumantik menjadi bagian dari upaya strategis Pemerintah Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan literasi digital masyarakat diantaranya melalui peluncuran program *Bekasi Smart City* yang mencakup pembangunan infrastruktur TIK seperti pemasangan Wi-Fi publik, penyediaan layanan publik berbasis aplikasi seperti *Bekasi Single Window* serta pelatihan literasi digital bagi ASN dan masyarakat umum. Selain itu, pemerintah daerah juga menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi, komunitas digital dan sektor swasta untuk memperluas jangkauan edukasi digital..

Strategi Peningkatan Literasi Digital Pemerintah Kota Bekasi Dalam Mendukung Pengembangan *Smart City*

Pemerintah Kota Bekasi selama ini telah melakukan sejumlah upaya konkret untuk mewujudkan *Smart City* melalui pendekatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam berbagai aspek pelayanan publik. Salah satu langkah awal yang signifikan adalah bergabungnya Kota Bekasi dalam *Gerakan Menuju 100 Smart City* pada tahun 2017 yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Sejak itu, Pemkot Bekasi secara bertahap mengembangkan berbagai platform digital seperti aplikasi *LAPOR Bekasi*, *e-Open* untuk layanan pengaduan masyarakat, dan *Bekasi Single Window (BSW)* untuk perizinan dan layanan administrasi (Kemenkominfo, 2021). Di bidang tata kelola pemerintahan, Kota Bekasi telah mengembangkan *command center* yang berfungsi sebagai pusat pemantauan berbagai aktivitas kota secara *real-time*, seperti lalu lintas, banjir, dan sistem keamanan. Selain itu, literasi digital masyarakat juga menjadi fokus penting, seperti melalui pelatihan digital untuk pelajar dan komunitas warga bekerja sama dengan *Masyarakat Peduli Literasi Digital (Malidi)* serta kampanye anti-hoaks yang digelar secara berkala (Diskominfo Bekasi, 2023).

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan kondisi ideal *Smart City* sebagaimana didefinisikan oleh Giffinger et al. (2007)—yakni kota yang cerdas dalam enam dimensi: smart governance, smart economy, smart environment, smart people, smart mobility, dan smart living—maka implementasi di Kota Bekasi masih belum

merata dan menyeluruh. Beberapa tantangan nyata masih ditemukan, seperti ketimpangan infrastruktur jaringan internet di wilayah pinggiran, kurangnya integrasi antar-platform layanan publik, serta rendahnya partisipasi aktif masyarakat digital akibat keterbatasan literasi digital. Data dari survei *Indeks Literasi Digital Nasional 2021* menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia berada pada angka 3,49 dari skala 5, dengan skor terendah pada aspek *digital safety* (3,10) yang mencerminkan lemahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan data pribadi (Katadata & Kominfo, 2021). Kondisi ini juga berlaku di Kota Bekasi yang masih menghadapi tantangan dalam membangun budaya digital yang inklusif dan aman bagi seluruh kalangan usia dan latar belakang pendidikan.

Idealnya, pengembangan *Smart City* di Kota Bekasi harus tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga didukung oleh pemberdayaan masyarakat yang kuat, ekosistem inovasi lokal yang hidup, serta keterlibatan aktif multi-stakeholder dalam setiap tahapan kebijakan. Pemerintah Kota Bekasi telah memiliki dasar regulatif seperti *Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kota Cerdas*, yang menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Namun dalam implementasinya, peran kolaboratif tersebut masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam perencanaan pembangunan berbasis data. Untuk mencapai kondisi ideal, perlu dilakukan penguatan sistem pendukung seperti perluasan akses infrastruktur digital di seluruh wilayah, peningkatan kompetensi ASN dalam pengelolaan data dan teknologi, serta perluasan pelatihan literasi digital yang bersifat massal dan berkelanjutan. Evaluasi berkala terhadap efektivitas platform digital dan indeks keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting untuk memastikan *Smart City* bukan hanya jargon kebijakan, tetapi realitas yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bekasi.

Tujuan peningkatan literasi digital Pemerintah Kota Bekasi, seperti dijelaskan oleh Nasrullah et al., (2017) yaitu mengedukasi masyarakat Kota Bekasi ketika memanfaatkan TIK dengan menggunakan teknologi digital dan komunikasi atau jaringan untuk mengelola, mengevaluasi, serta menggunakan informasi secara bijak dan benar. Tidak hanya itu adanya literasi digital ditujukan untuk menggunakan media digital dengan bertanggung jawab, mengetahui aspek dan konsekuensi hukum terkait dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Fitur yang perlu dipahami mencakup penggunaan teknologi internet dan situs yang dapat memberikan kredibilitas, inovasi serta produktivitas. Selain itu, terdapat juga sasaran spesifik yang ingin dicapai dalam peningkatan literasi digital masyarakat Kota Bekasi diantaranya sebagai berikut :

- a. Peningkatan jumlah dan variasi bacaan literasi digital yang ada pada fasilitas publik.
- b. Peningkatan frekuensi membaca bacaan literasi digital.
- c. Peningkatan jumlah bacaan literasi digital yang dibaca oleh masyarakat.
- d. Peningkatan jumlah partisipasi aktif komunitas, lembaga atau instansi dalam penyediaan bahan bacaan literasi digital.

- e. Peningkatan jumlah fasilitas publik untuk mendukung literasi digital.
- f. Peningkatan jumlah kegiatan literasi digital yang ada di masyarakat.
- g. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam literasi digital.
- h. Peningkatan jumlah pelatihan literasi digital yang praktis dan bermanfaat bagi masyarakat.
- i. Peningkatan penggunaan media digital dan internet dalam memberikan akses informasi dan layanan publik.
- j. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang penggunaan internet dan UU ITE.
- k. Peningkatan pelatihan literasi digital yang praktis dan bermanfaat.
- l. Peningkatan jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan memiliki dampak.

Selanjutnya dalam meningkatkan literasi bagi masyarakat Kota Bekasi diperlukan sebuah strategi peningkatan literasi digital Pemerintah Kota Bekasi dalam mendukung pengembangan *Smart City*. Adapun strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, mengacu pada konsep strategi yang diungkapkan oleh Nasrullah et al., (2017) sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas fasilitator, meliputi :
 - a. Pelatihan penggunaan aplikasi atau perangkat digital.
Sangat penting menggunakan aplikasi atau perangkat digital dalam literasi di era digital sekarang. Oleh karena itu, masyarakat Kota Bekasi dapat difasilitasi dengan pelatihan atau sosialisasi agar mampu memahami cara penggunaan aplikasi seperti e-open, Sibrojol, Aplikasi Sorot, Aplikasi Sikerja, Aplikasi SILAT, dan Aplikasi Bekasi Iconic.
 - b. Pelatihan penulisan di media jurnal harian online.
Media digital yang digunakan untuk menyalurkan tulisan, dewasa ini sangat beragam, seperti menulis di blog atau situs berita online. Oleh karena itu, diperlukan dukungan bagi masyarakat Kota Bekasi dalam hal pelatihan membaca, menulis, membuat akun, dan juga cara mengunggah tulisan di akun tersebut agar tulisan yang telah dibuat bisa diakses oleh masyarakat secara luas.
 - c. Pelatihan penggunaan aplikasi internet.
Pelatihan aplikasi internet diselenggarakan untuk memperkuat kemampuan literasi digital masyarakat Kota Bekasi. Masyarakat diajarkan pentingnya pemakaian media sosial yang bijak melalui penulisan atau penyebaran konten positif, serta kemampuan untuk menganalisis dan memverifikasi informasi agar terhindar dari penyebaran berita palsu (*hoaks*), serta memanfaatkan internet untuk memperoleh informasi yang memiliki nilai dan manfaat.
 - d. Sosialisasi bahan referensi terkait hukum dan etika penggunaan media digital.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemerintah Kota Bekasi memperkenalkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik bagi masyarakat berupa sosialisasi. Diperlukan pengaturan yang sesuai agar penggunaan informasi yang bebas dapat meningkatkan kemampuan dan pemikiran dalam teknologi informasi secara bertanggung jawab. Hadirnya sosialisasi aturan ini menjadikan adanya rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

2. Peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu, meliputi :
 - a. Penyediaan sumber belajar terkait teknologi informasi dan komunikasi di ruang publik
Kenaikan jumlah dan variasi bacaan tentang TIK berupa bahan bacaan di ruang layanan publik Kota Bekasi. Diharapkan lebih banyak sumber belajar berupa *soft file* atau informasi digital pada sarana umum seperti pada layar digital di ruang publik agar lebih mudah dijangkau melalui smart phone yang saat ini digunakan masyarakat luas.
 - b. Penyebaran informasi dan pengetahuan melalui media sosial
Sebagian besar masyarakat Kota Bekasi telah menggunakan media sosial. Memanfaatkan media sosial adalah sebagai wadah menyebarkan informasi dan pengetahuan sebagai bagian dari pembelajaran. Diharapkan masyarakat kritis dan bijak dalam menyebarkan informasi dan pengetahuan yang dimiliki.
3. Perluasan akses sumber belajar dan jangkauan peserta, meliputi :
 - a. Penyediaan akses internet di ruang publik
Menyediakan internet menjadi penting dalam kemajuan pengetahuan di era digital saat ini. Akses internet memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah dan cepat mendapatkan sumber belajar yang dibutuhkan. Masyarakat Kota Bekasi perlu memiliki akses internet baik di ruang publik maupun secara pribadi untuk memperoleh pengetahuan dan meningkatkan keterampilan.
 - b. Penyediaan informasi melalui media digital di ruang publik
Menyediakan layar informasi digital di tempat umum sangat menolong masyarakat Kota Bekasi untuk mendapatkan informasi dan wawasan baru. Tampilan informasi di ruang umum bisa berisi materi-materi ilmu pengetahuan terbaru, informasi sains dasar, berita terkini, serta permainan edukatif yang menarik. Semua informasi bisa dipresentasikan dan diberikan sebagai peningkatan pengetahuan masyarakat.
4. Peningkatan Pelibatan Publik, meliputi :
 - a. Sesi Berbagi
Sesi dapat diadakan dengan mengundang ahli untuk berbagi pengalaman dalam menerapkan teknologi digital di pekerjaan dan aktivitas keseharian. Keterlibatan ahli, akademisi, praktisi, dan profesional dalam bidang TIK di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap literasi digital melalui kegiatan-kegiatan yang edukatif.

- b. Pelibatan Para Pemangku Kepentingan
Pemangku kepentingan dalam hal ini yaitu Kemenkominfo selaku Pemerintah pusat, Pemerintah Kota Bekasi selaku Pemda, dunia usaha dan industri, media, serta akademisi. Keterlibatan seluruh pihak dalam upaya meningkatkan literasi digital warga Kota Bekasi bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengadakan pameran digital, menyediakan fasilitas literasi digital, dan menyelenggarakan pelatihan literasi digital khusus untuk fasilitator.
5. Penguatan Tata Kelola, meliputi :
 - a. Pembuatan Kesepakatan atau Peraturan
Adanya kesepakatan ataupun peraturan yang kuat didalam kelembagaan dan Pemda Kota Bekasi dalam memanfaatkan penggunaan TIK dan media digital di ruang publik
 - b. Pengalokasian Anggaran Dana Alokasi Khusus.
Pengalokasian anggaran dana dalam dana alokasi khusus yang bisa digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas dan pendampingan masyarakat dalam meningkatkan literasi digital. Manajemen yang baik diperlukan untuk memastikan teknologi informasi dan komunikasi tetap bermanfaat dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dana alokasi khusus tidak saja digunakan sebagai cara merawat sarana prasarana, namun juga digunakan dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada petugas pengelola agar bisa menggunakan TKI yang ada secara mahir dan maksimal, sehingga penguatan secara sumber daya manusia dapat dioptimalkan dengan baik dan diharapkan dapat mewujudkan generasi emas 2045 yang kuat, cerdas dan memiliki daya saing tinggi dibidang TIK.

PENUTUP

Simpulan

Literasi digital melibatkan keahlian mencari, menggunakan, dan menyebarkan informasi, serta keterampilan dalam menciptakan informasi, evaluasi kritis, ketepatan aplikasi, dan pemahaman secara mendalam terhadap konten digital. Di sisi lain, bertanggung jawab atas setiap informasi yang disebar karena dapat mempengaruhi masyarakat adalah bagian dari literasi digital. Literasi digital juga dimaksudkan untuk memanfaatkan teknologi digital dengan bijaksana, memahami aspek-aspek hukum dan konsekuensi terkait UU No. 19 Tahun 2016. Literasi digital memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat Kota Bekasi di era transformasi digital saat ini.

Strategi Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat untuk mendukung pengembangan *Smart City* adalah dengan memberikan edukasi tentang penggunaan teknologi digital dan komunikasi secara bijak dan kreatif melalui pelatihan aplikasi, peningkatan sumber belajar bermutu, akses internet di ruang publik, serta penyebaran informasi lewat media sosial dan keterlibatan pemangku kepentingan. Penguatan tata kelola juga dilakukan melalui penyusunan

aturan dan anggaran serta dukungan terhadap fasilitas penunjang di area publik yang dapat digunakan dengan mudah oleh masyarakat.

Saran

Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai proses evaluasi terkait strategi yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan literasi digital, apakah dengan strategi yang ada terbukti mendukung upaya pengembangan *Smart City* ataukah belum berdampak banyak dalam pembangunan *Smart City*. Adanya berbagai strategi ini juga menjadi ajang untuk berbagai pemangku kepentingan dapat berkomitmen, bersinergi dan berkolaborasi untuk membangun Kota Bekasi menjadi Kota yang ramah dan terbuka akan Teknologi Informasi dan Komunikasi seiring dengan perkembangan transformasi digital diberbagai Kota di Indonesia. Selain itu diperlukan juga keberlanjutan berbagai program dari Pemerintah Kota Bekasi untuk secara masif dan terus menerus menggerakkan masyarakat bersama-sama belajar dan berkreasi mendukung peningkatan literasi digital masyarakat Kota Bekasi serta dukungan fasilitas edukasi bagi tenaga pengelola digital ataupun masyarakat yang memiliki bakat dan minat dalam teknologi digital serta bantuan anggaran dana dari berbagai pihak tidak hanya dari pemerintah, namun juga lintas sektor, swasta dan bisnis untuk mengimplementasikan kegiatan literasi digital dan pengembangan *Smart City* kedepannya demi kemajuan Kota Bekasi yang keren.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawden, D. (2001). Information and digital literacies: A review of concepts. *Journal of Documentation*, 57(2), 218–259. <https://doi.org/10.1108/EUM0000000007083>
- Buku Panduan Penyusunan Master Plan Smart City 2017: Gerakan Menuju 100 Smart City*. (2017). Kementerian Komunikasi dan Informasi Negara Republik Indonesia.
- Chayko, M. (2018). *Superconnected*. SAGE Publications.
- Diskominfostandi Kota Bekasi. (2023). *Laporan Kinerja Diskominfostandi 2023*. Bekasi: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi.
- Deakin, M. (2014). *Smart Cities: Governing, Modelling and Analysing the Transition - Google Books*. Routledge. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=_QOCAAQAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Deakin,+Mark+\(2013-08-22\).+%22From+intelligent+to+smart+cities%22.+In+Deakin,+Mark.+Smart+Cities:+Governing,+Modelling+and+Analysing+the+Transition.+Taylor+and+Francis.+p.+15.+ISBN](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=_QOCAAQAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Deakin,+Mark+(2013-08-22).+%22From+intelligent+to+smart+cities%22.+In+Deakin,+Mark.+Smart+Cities:+Governing,+Modelling+and+Analysing+the+Transition.+Taylor+and+Francis.+p.+15.+ISBN)
- Djunaedi, A., Marsoyo, A., Suharyanto, I., Roychansyah, M. S., Nugrahandika, W. H., Probosubanu, L., Pandangwati, S. T., & Achmad, K. A. (2018). *Langkah-langkah Awal Menuju Smart City Kasus Kota Yogyakarta 2016-2017* (Cetakan 1:). Nusa Media.
- Djunaedi, A., Permadi, D., Nugroho, L. E., Widyawan, Rachmawati, R., Hidayat, A., Achmad, K. A., & Egaravanda, S. (2018). *Membangun Kota dan Kabupaten Cerdas: Sebuah Panduan bagi Pemerintah Daerah* (Tim CFDS (Ed.); Cetakan ke). Gadjah Mada University Press.
- Ghaffarianhoseini, A., AlWaer, H., Ghaffarianhoseini, A., Clements-Croome, D., Berardi, U., Raahemifar, K., & Tookey, J. (2018). Intelligent or smart cities and buildings: a critical exposition and a way forward. *Intelligent Buildings International*, 10(2), 122–129. <https://doi.org/10.1080/17508975.2017.1394810>
- Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., & Meijers, E. (2007). Smart Cities Ranking of European Medium-Sized Cities. *Digital Agenda for Europe*, 1–12.
- Gilster, P. (1997). *Digital Literacy*. John Wiley & Sons, Inc.
- Hagel, P. (2015). Towards an understanding of ‘Digital Literacy(ies).’ *Discourse: Deakin University Library Research and Practice*, 2. <https://doi.org/10.21153/dsc2015no1art1>
- Hootsuite, W. &. (2021). *Digital 2021: Indonesia*. <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>
- Kurniawati, A. (2020). Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan *Smart City* Berbasis Komunitas di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 17(2), 143–153
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). *Gerakan Menuju 100 Smart City: Laporan Tahunan*. Jakarta: Kemenkominfo RI.
- Mahmudah, I., & Hasanah, S. N. (2022). Literasi Digital dan Tantangan *Smart City* di Kota Surabaya. *Jurnal Informasi dan Komunikasi Publik*, 5(1), 51–63
- Marric, T., Chrysaninta, R., Putri, W., Studi, P., Ilmu, M., Jaya, U. A., Daerah, I., Yogyakarta, I., & Movement, D. L. (2019). Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Melaksanakan Gerakan Literasi Digital. *Journal of Social Politics and Governance*, 1(2), 159–173.
- Mohammadyari, S., & Singh, H. (2015). Understanding the effect of e-learning on individual performance: The role of digital literacy. *Computers & Education*, 82, 11–25. <https://doi.org/10.1016/J.COMPEDU.2014.10.025>
- Nasrullah, R., Aditya, W., Satya, T. I., Nento, M. N., Hanifah, N., Miftahussururi, & Akbari, Q. S. (2017). Materi Pendukung Literasi Digital. *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 43. <http://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/wp-content/uploads/2017/10/literasi-DIGITAL.pdf>
- Nugroho, R., & Pratama, A. (2021). Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Implementasi *Smart City* di Kota Bandung. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 9(2), 189–204.
- Nurmandi, A. (2014). *Manajemen Perkotaan: Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas*

- (Cetakan Ke). Jusuf Kalla School of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (JKSG UMY).
<https://www.scribd.com/document/360443049/Manajemen-Perkotaan>
- Pemerintah Kota Bekasi. (2016). *Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 110 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kota Cerdas Bekasi*. Bekasi: Pemkot Bekasi.
- Rivoltella, P. C. (2008). Digital literacy: Tools and methodologies for information society. In *Digital Literacy: Tools and Methodologies for Information Society*. <https://doi.org/10.4018/978-1-59904-798-0>
- Saputra, R., & Widiensyah, A. (2021). Efektifitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berbasis Elektronik Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Bekasi). *Cakrawala - Jurnal Humaniora*, 21(1), 39–50.
<https://doi.org/10.31294/jc.v21i1.9638>
- Siregar, H. S., & Puspitasari, R. (2022). Indeks Literasi Digital Masyarakat Kota Bekasi: Analisis terhadap Tantangan dan Strategi. *Jurnal Literasi Digital Indonesia*, 1(1), 25–36.
- Sense, A. (2009). *Digital literacy and citizenship in the 21st century*. Common Sense Media.
- Suherdi, D., Rezky, S. F., Apdilah, D., Sinuraya, J., Sahputra, A., Syahputra, D., & Wahyuni, D. (2021). *Peran Literasi Digital Di Masa Pandemi*. Cattleya Darmaya Fortuna.
- Susanto, T. D. (2019). *SMARTCITY : KONSEP , MODEL & TEKNOLOGI Bunga Rampai Pengetahuan , Gagasan , & Rekomendasi ITS untuk Indonesia By Institut Teknologi Sepuluh Nopember Maret 2019 Dimensi I - Smart Govern ...* (Cetakan Pe). Asosiasi Sistem Informasi Indonesia (AISINDO).
- Wheeler, S. (2013). Digital literacies for engagement in emerging online cultures. *ELC Researcj Paper Series*, 5, 14–25.
- Yang, J. H. (2012). *Smart City Smart Energy. KC Smart Srvce*. <https://doi.org/10.31171/vlast.v27i2.6298>
- Yud. (2019). *Program Smart City Kota Bekasi Dinilai Hanya Sebatas Wacana*. Radarnonstop.Co.
<https://m.radarnonstop.co/read/9979/Program-Smart-City-Kota-Bekasi-Dinilai-Hanya-Sebatas-Wacana>